

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Program DASHAT atau Dapur Sehat Atasi Stunting merupakan pusat gizi dan pelayanan pada baduta *stunting*, ibu menyusui, dan ibu hamil KEK. Program DASHAT merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini telah direalisasikan di berbagai desa maupun kecamatan di seluruh Indonesia termasuk di Desa Surengede, Kecamatan Kejajar. Program DASHAT dilaksanakan selama 90 hari berturut-turut dan diwujudkan dalam bentuk pembuatan makanan di dapur yang sudah disiapkan sesuai ketentuan, sehingga proses pengantaran dan pemantauan sasaran *stunting* bisa dilakukan dengan maksimal. Program DASHAT yang dilaksanakan di Desa Surengede diselenggarakan oleh DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo dengan beberapa *stakeholder* lain yaitu LPTP Wonosobo, bidan desa, serta kader posyandu Desa Surengede.

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan, pembentukan *commitment to the process* dalam program DASHAT di Desa Surengede belum bisa sempurna. Hal ini dikarenakan ada dimensi dan faktor dalam *commitment to the process* yang belum terlaksana secara maksimal.

Dalam program DASHAT di Desa Surengede, ditemukan bahwa pemenuhan atas dimensi *commitment to the process* masih sangat minim. Hal ini ditunjukkan dengan ketiga dimensi *commitment to the process* yang masih terdapat kekurangan. Dalam dimensi *mutual recognition of interdependence*, pengakuan saling bergantung antar-*stakeholder* menjadi focus utama. Pengakuan saling bergantung dapat diraih apabila seluruh *stakeholder* dapat mendefinisikan masalah yang akan diatasi dan peran yang akan dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaan DASHAT di Desa Surengede, kader posyandu belum memahami *stunting*. Kurangnya pemahaman mengenai *stunting* ini juga diakibatkan oleh rendahnya pengetahuan.

Selanjutnya pada dimensi *shared ownership of process*, semua *stakeholder* telah menjalankan tanggung jawab yang ada. Namun begitu, DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo sebagai *leading sector* belum dapat merancang teknis pelaksanaan DASHAT dan menyerahkan segalanya ke Desa Surengede. Jika ditinjau dalam aspek *shared ownership of process*, kepemilikan bersama atas proses kolaborasi adanya program DASHAT memang sudah ada, namun tanggung jawab yang dimiliki oleh *stakeholder* belum merata dijalankan.

Pada dimensi *openness to exploring mutual gains*, beberapa *stakeholder* telah mendapatkan keuntungannya masing-masing, namun kader posyandu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari adanya program DASHAT di Desa Surengede ini. Selanjutnya, program DASHAT ini tidak diawali dengan rundingan awal untuk membahas keuntungan yang akan diraih masing-masing *stakeholder*. Sosialisasi di awal hanya dilaksanakan untuk memperkenalkan program DASHAT

tanpa menjelaskan mengenai keuntungan yang akan diraih tiap-tiap pihak. Tidak hanya itu, masing-masing stakeholder juga tidak bersifat terbuka mengenai keuntungan yang akan diraih. Sehingga, program DASHAT ini dilaksanakan tanpa ada kesepakatan mengenai tujuan-tujuan yang harus dicapai untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi masing-masing pihak *stakeholder*.

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemenuhan dimensi *commitment to the process* dalam program DASHAT di Desa Surengede belum bisa berjalan dengan maksimal yang ditandai dengan beberapa permasalahan yang masih ditemukan.

Selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi *commitment to the process* dalam program DASHAT di Desa Surengede. Faktor-faktor ini dibagi menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat.

Dari segi faktor pendorong, dalam faktor *complex problems* ditemukan bahwa masalah stunting mendorong seluruh stakeholder untuk bekerja sama dalam mencari solusi. Dalam program DASHAT yang dilaksanakan di Desa Surengede, Seluruh stakeholder memiliki rasa kesatuan untuk melaksanakan program DASHAT. Hal ini ditunjukkan dengan pemahaman stakeholder mengenai program DASHAT. Tidak hanya itu, semua stakeholder juga memiliki dorongan untuk menciptakan solusi dalam pengentasan stunting di Desa Surengede.

Pada faktor *stakeholder interdependence*, rasa ketergantungan antar-stakeholder juga telah terbentuk yang ditunjukkan dengan keinginan *stakeholder* untuk saling berkolaborasi. Keinginan *stakeholder* untuk bekerja sama juga

ditunjukkan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing *stakeholder* dalam program DASHAT.

Selain itu, faktor motivasi menunjukkan bahwa dorongan *stakeholder* dalam mengikuti program juga cukup kuat meskipun dengan alasan yang berbeda-beda sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Dari segi faktor penghambat, faktor *commitment* menjadi salah satu faktor yang cukup krusial. Meskipun DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo serta LPTP Wonosobo memiliki keputusan awal untuk bergabung dalam program DASHAT, bidan desa dan kader posyandu tidak memiliki keputusan awal. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program DASHAT hanya dijalankan karena adanya perintah dari pemerintah.

Faktor *trust* juga menjadi salah satu faktor penghambat dikarenakan unsur kepercayaan tidak dapat diperoleh dari para kader posyandu di Desa Surengede. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan program DASHAT yang dilakukan oleh kader posyandu semata-mata berdasarkan instruksi langsung dari pemerintah desa dan bidan desa. Akibatnya, para kader posyandu tidak terlibat dalam diskusi atau musyawarah yang dapat membangun rasa saling percaya di antara pemangku kepentingan lainnya.

Selanjutnya, dalam faktor *protocols* juga menjadi salah satu faktor penghambat dikarenakan protocol yang dibuat tidak membagi beban kerja secara adil. Kaader posyandu sebagai pelaksana program DASHAT memiliki tanggung jawab yang besar dibandingkan dengan *stakeholder* lainnya, Peran dan tanggung

jawab yang telah dilaksanakan kader posyandu tidak sebanding dikarenakan tidak ada intensif yang diberikan kepada kader posyandu. Tidak hanya itu, partisipasi dalam penyusunan protocol juga tidak melibatkan semua stakeholder yang ada. DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo sebagai *leading sector* tidak memiliki acuan dalam pelaksanaan teknis.

Dalam faktor *representation & participation*, meskipun *stakeholder* lain dapat memberikan pendapat pada forum, namun partisipasi kader posyandu dalam memberikan pendapat dan juga pandangan sangatlah minim. Interaksi rutin program DASHAT yang dapat diselenggarakan untuk menumbuhkan partisipasi *stakeholder* juga tidak terlaksana.

Lebih jauh, faktor *consensus* yang diwujudkan melalui dialog, rundingan, dan kesepakatan juga tidak terlaksana dengan merata. Hal ini dikarenakan program DASHAT dilaksanakan sebagai bentuk birokrasi dan diselenggarakan karena adanya arahan saja. Diskusi awal yang terjadi tidak mengikutsertakan beberapa *stakeholder*. Sehingga, tidak semua *stakeholder* ikut andil dalam pembuatan kesepakatan.

Faktor *leaders* juga menjadi salah satu faktor penghambat dikarenakan DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo sebagai *leading sector* belum bisa menjadi pemimpin yang maksimal dikarenakan DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo belum bisa merancang teknis pelaksanaan program DASHAT. Sehingga, teknis pelaksanaan diserahkan kepada *stakeholder* lain yaitu bidan desa dan pemerintah desa setempat.

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor pendorong *commitment to the process* dalam program DASHAT memang sudah terbentuk. Faktor pendorong tersebut menjadi salah satu langkah dalam mewujudkan keberhasilan program DAHSAT. Namun begitu, faktor-faktor penghambat *commitment to the process* dalam program DASHAT juga masih ditemukan. Adanya faktor penghambat tersebut mengurangi efektivitas program DASHAT dan dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu mengentaskan *stunting* di Desa Surengede.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun program DASHAT telah berjalan dengan melibatkan berbagai *stakeholder*. Namun begitu, masih diperlukan perbaikan dalam beberapa aspek. Diperlukan peningkatan pemahaman kader posyandu mengenai *stunting*, penyusunan teknis pelaksanaan yang jelas untuk pelaksanaan program, serta diskusi yang lebih inklusif dalam perencanaan dan pembagian manfaat bagi *stakeholder*.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian mengenai *commitment to the process* dalam program DASHAT di Desa Surengede, berikut beberapa saran dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan untuk memaksimalkan *commitment to the process* agar kerja sama DASHAT dapat dilaksanakan secara maksimal

1. DPPKBPPPA harus melaksanakan evaluasi mengenai bimbingan teknis & pemberian edukasi kaitannya dengan *stunting* kepada kader posyandu.

2. DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo harus melakukan penyusunan SOP (*Standard Operating Procedure*) & perencanaan teknis pelaksanaan program yang jelas dan terstruktur dan alur kerja sebagai pedoman pelaksanaan program DASHAT di Kabupaten Wonosobo.
3. Semua *stakeholder* harus melaksanakan diskusi awal untuk membahas keuntungan antar-stakeholder dan negosiasi kesepakatan sebagai bentuk musyawarah yang dapat dilakukan oleh para *stakeholder* dalam membahas keuntungan-keuntungan yang dapat diraih saat bergabung dalam program DASHAT.
4. DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo selaku *leading sector* dapat memberikan ruang untuk berpendapat secara bebas dan luas melalui diskusi yang dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan semua *stakeholder* yang ada.